



**PEMIKIRAN POLITIK BUNG HATTA DALAM BUKU TIGA
JILID BERJUDUL: UNTUK NEGERIKU SEBUAH
OTOBIOGRAFI
(STUDI MENGENAI NASIONALISME DAN DEMOKRASI)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos)

UNNES
OLEH:
Farid Luthfi Assidiqi
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
3312413044

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada:

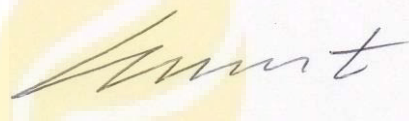
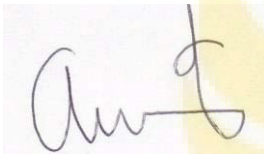
Hari : Kamis

Tanggal : 31 Agustus 2017

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Moh. Aris Munandar, S.Sos, MM

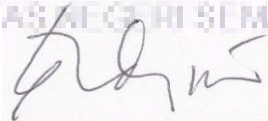
Noorochmat Isdaryanto, S.S., M.Si

NIP.197207242000031001

NIP.197112042010121001

Mengetahui,
Ketua Jurusan PKn

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



Drs. Tijan, M.Si
NIP. 196211201987021001

PENGESAHAN KELULUSAN

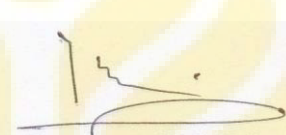
Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 27 September 2017

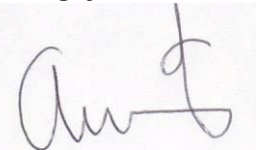
Menyetujui,

Penguji I



Dr. Suprayogi M. Pd

Penguji II



Moh. Aris Munandar, S.Sos, MM

NIP.197207242000031001

Penguji III



Noorochmat Isdaryanto, S.S., M.Si

NIP.197112042010121001

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial



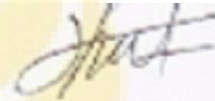
Drs. Moh. Solchatul Mustofa, MA

NIP. 196308021988031001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa tulisan yang ada di dalam skripsi ini benar – benar hasil karya saya sendiri. bukan plagiat dari karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhannya. Jika ada pendapat ataupun temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini di kutip atau di rujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 21 Agustus 2017



Farid Luthfi Assidiqi

NIM. 3312413044



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- Kepada pemuda Indonesia yang ingat sumpah dan janjinya: Indonesia tanah pusaka, pusaka kita semuanya, mari kita berjanji, Indonesia abadi.
- Jangan menginginkan suatu ilmu jika tidak mau bersusah payah untuk mendapatkannya
- Barangsiapa melayani dengan ikhlas maka kelak dia akan dilayani
- Belajar berjuang bertaqwa

PERSEMBAHAN

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya dalam kelancaran penyusunan Skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya tercinta yang tiada henti-hentinya mengirimkan doa dan bimbingan kepada saya dalam tiap-tiap kehidupan yang saya lalui.
3. Guru-guru saya yang mulia, Habib Luthfi bin Yahya, Drs. KH. Chabib Makki, KH. Almamnuhin Kholid, dan Drs. KH. Muhammad Masroni yang selalu saya harapkan doa restu dan keberkahan ilmu dari beliau-beliau yang saya muliakan.
4. Rekan-rekan seperjuangan dari Pondok Pesantren Al Amien Purwokerto, Pondok Pesantren Al Asror Semarang, dan Pondok Pesantren Sunan Gunungjati Ba'alawy Semarang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

5. Rekan-rekanita seperjuangan di PKPT IPNU-IPPNU Unnes terkhusus kepada rekan yang telah turut berjuang bersama saya mempertahankan dan mengembangkan islam Nahdliyin di lingkungan Universitas Negeri Semarang.
6. Rekan-rekanita Pengurus Wilayah IPNU-IPPNU Jawa Tengah dan rekan-rekanita Pengurus Cabang IPNU-IPPNU Kota Semarang yang telah memberikan tambahan pengalaman kepada saya dalam berorganisasi.
7. Dosen pembimbing saya bapak Moh. Aris Munandar, S.Sos, MM dan bapak Noorochmat Isdaryanto, S.S., M.Si.
8. Teman-Teman Program Studi Ilmu Politik UNNES
9. Almamaterku “UNNES” tercinta



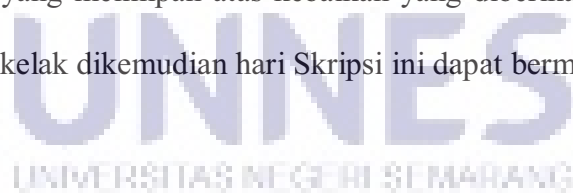
PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan petunjuk-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Pemikiran Politik Bung Hatta dalam Buku Tiga Jilid Berjudul: Untuk Negeriku Sebuah Otobiografi” dapat diselesaikan baik dan tepat waktu. Penulis menyadari bahwa dalam melakukan penulisan skripsi ini, banyak pihak yang ikut membantu. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah Subhanahu Wata’ala atas segala nikmat yang diberikan untuk penulis sehingga tiada alasan untuk penulis kecuali bersyukur kepadanya.
2. Nabi Muhammad Shollallohu ‘alaihi wasallam yang memberikan teladan kepada penulis.
3. Drs. Mohammad Hatta yang telah memberikan sumbangsih pemikirannya bagi bangsa Indonesia dan menjadi sumber inspirasi penulis dalam menyusun skripsi ini.
4. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menuntut ilmu dengan segala kebijakannya.
5. Drs. Moh.Solehatul Mustofa, MA., Dekan Fakultas Ilmu Sosial yang dengan kebijaksanaannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan baik.

6. Moh. Aris Munandar, S.Sos, MM Dosen pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
7. Noorochmat Isdaryanto, S.S., M.Si, Dosen pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
8. Seluruh Dosen dan Karyawan Jurusan PKn Fakultas Ilmu Sosial atas ilmu yang telah diberikan selama menempuh perkuliahan serta bantuan dan motivasi yang telah diberikan selama ini.
9. Keluarga penulis, khususnya orang tua tercinta yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis dengan tulus.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam kelancaran penulisan Skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Demikian skripsi ini disusun, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan yang melimpah atas kebaikan yang diberikan kepada penulis dan semoga kelak dikemudian hari Skripsi ini dapat bermanfaat.



Semarang, 21 Juli 2017

Penyusun

SARI

Farid Luthfi Assidiqi. 2017. *Pemikiran Politik Bung Hatta dalam Buku Tiga Jilid Berjudul: Untuk Negeriku Sebuah Otobiografi*. Skripsi, Jurusan PKN. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Moh. Aris Munandar, S.Sos, MM dan Pembimbing II Noorochmat Isdaryanto, S.S., M.Si.

Kata kunci: Pemikiran, Politik, Bung Hatta, Untuk Negeriku Sebuah Otobiografi

Drs. Mohammad Hatta merupakan salah satu *founding fathers* bangsa Indonesia, sekaligus pemikir yang menguasai berbagai disiplin ilmu Barat, namun tetap berpegang pada nilai-nilai ke-indonesiaan. Karya-karyanya sangat banyak dan mewakili identitas bangsa Indonesia, Bung Hatta pernah mengenyam pendidikan di Belanda namun karena nasionalisme dan pemahamannya tentang Indonesia membuat karyanya sangat layak untuk dikaji secara teoritis. Bung Hatta mencurahkan pemikirannya dengan menulis berbagai buku dan menulis kolom-kolom di berbagai surat kabar baik dalam maupun luar negeri. Buku Untuk Negeriku: Sebuah Otobiografi sangat menarik untuk dijadikan sumber dalam mengupas pemikiran politik Bung Hatta dalam kurun waktu 1908-1949, dari peristiwa yang menjadi latar belakang, hingga proses pengembangan dari pemikiran politik tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan dari penelitian penulis adalah: Pertama, mengetahui tema pemikiran Politik Bung Hatta semasa Sekolah. Kedua, mengetahui tema pemikiran politik Bung Hatta semasa Pergerakan Nasional. Ketiga, mengetahui tema pemikiran politik Bung Hatta semasa Revolusi Fisik.

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan analisis wacana kualitatif dengan mengidentifikasi pemikiran politik Bung Hatta dalam buku tiga jilid berjudul Untuk Negeriku: Sebuah Otobiografi. Dengan fokus ini, maka penelitian pemikiran politik Bung Hatta akan mengambil intisari dari pemikiran politik Bung Hatta yang terdapat dalam buku Untuk Negeriku: Sebuah Otobiografi.

Hasil penelitian dari penulis, Tema Pemikiran politik Bung Hatta pada masa sekolah adalah mulai muncul dan berkembangnya pemikiran Bung Hatta mengenai nasionalisme, ekonomi politik dan sosialisme. Sedangkan tema pemikiran politik Bung Hatta pada masa pergerakan nasional meliputi nasionalisme, ekonomi politik, demokrasi, dan kepemimpinan. Pada masa Revolusi Fisik, tema pemikiran politik Bung Hatta meliputi kepemimpinan, demokrasi, dan ekonomi politik. Berdasarkan tema-tema politik tersebut, tema utama pemikiran politik Bung Hatta adalah mengenai jiwa nasionalisme dan pemikirannya tentang demokrasi.

Saran dalam penelitian ini kepada para pemimpin bangsa saat ini adalah supaya melestarikan cita-cita Bung Hatta untuk menciptakan negara Indonesia yang demokratis serta menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Kepada para akademisi, penelitian ini merupakan langkah awal terhadap kajian pemikiran para *founding fathers* kita. Kepada masyarakat umum, agar perlu mengenal para tokoh pendiri bangsa agar kita tidak kehilangan identitas sebagai bangsa Indonesia.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan Kelulusan	iii
Pernyataan	iv
Motto dan Persembahan	v
Prakata	vii
Sari	ix
Daftar Isi	x
Bab I: Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah	6
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Batasan Istilah	7
Bab II: Tinjauan Pustaka dan Kerangka Berpikir	10
A. Deskripsi Teoritis	10
1. Analisis Wacana	10
a. Bahasa, Analisis Teks, dan Wacana	10
b. Pengertian Analisis Wacana	15
c. Metode Analisis Wacana Deskriptif	16
d. Hermeneutika	17
2. Pemikiran Politik	20
a. Pemikiran	20
b. Pemikiran Politik	23
c. Pemikiran Politik Bung Hatta	39
B. Kerangka Berpikir	43
Bab III: Metode Penelitian	44
A. Latar Penelitian	44
B. Fokus Penelitian	44
C. Sumber Data	44
D. Alat dan Teknik Pengumpulan Data	45
E. Uji Keabsahan Data	45
F. Teknik Analisis Data	46
Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan	48
A. Hasil Penelitian	48
1. Gambaran Umum Drs. Mohammad Hatta	48
2. Perkembangan Pemikiran Politik Bung Hatta Semasa Sekolah (1908-1921)	53
3. Pemikiran Politik Bung Hatta Pada Masa Pergerakan Nasional (1921-1945)	69
4. Pemikiran Politik Bung Hatta Masa Revolusi Fisik (1945-1949)	112
B. Pembahasan	119
1. Tema Pemikiran Politik Bung Hatta pada Masa Sekolah	119

a. Perkembangan Pemikiran tentang Nasionalisme	119
b. Ekonomi Politik dan Sosialisme	126
2. Tema Pemikiran Politik Bung Hatta Masa Pergerakan Nasional..	128
a. Nasionalisme	128
b. Kepemimpinan	136
c. Ekonomi Politik.....	140
d. Demokrasi.....	141
3. Tema Pemikiran Politik Bung Hatta Masa Revolusi Fisik	143
a. Kepemimpinan	143
b. Demokrasi.....	145
c. Ekonomi Politik.....	149
Tabel 1.1 Pemikiran Politik Bung Hatta pada Masa Sekolah (1908-1921)	151
Tabel 1.2 Pemikiran Politik Bung Hatta pada Masa Pergerakan Nasional (1921-1942).....	152
Tabel 1.3 Pemikiran Politik Bung Hatta pada Masa Revolusi Fisik (1945-1949)	155
4. Sistematisasi Relevansi Pemikiran Politik Bung Hatta terhadap Indonesia Masa Kini.....	157
BAB V: Penutup	164
1. Simpulan.....	164
2. Saran.....	167
Daftar Pustaka	169
Lampiran	174

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Drs. Mohammad Hatta merupakan salah satu *founding fathers* bangsa Indonesia sekaligus pemikir yang menguasai berbagai disiplin ilmu Barat namun tetap berpegang pada nilai-nilai ke-indonesiaan. Karya-karyanya sangat banyak dan mewakili identitas bangsa Indonesia, Bung Hatta pernah mengenyam pendidikan di Belanda, namun karena Nasionalisme dan pemahamannya tentang Indonesia membuat karyanya sangat layak untuk dikaji secara teoritis. Bung Hatta mencurahkan pemikirannya dengan menulis berbagai buku dan menulis kolom-kolom di berbagai surat kabar baik dalam maupun luar negeri. Melalui tulisan-tulisannya itulah nama Hatta menjadi dikenal luas di kalangan masyarakat, baik itu masyarakat pribumi maupun masyarakat di Negeri Belanda. Berbagai macam buku pernah ditulis Hatta mulai dari Filsafat, Ekonomi, Politik, dan Kebangsaan.

Buku Bung Hatta yang menarik perhatian penulis adalah buku Otobiografi Bung Hatta berjudul *Mohammad Hatta: Memoir* yang diterbitkan pada tahun 1979 . Buku tersebut diterbitkan ulang dalam tiga jilid pada tahun 2011 dengan judul *Untuk Negeriku: Sebuah Otobiografi*. Buku ini menceritakan perjalanan hidup Bung Hatta sejak tahun 1902 hingga pegakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949. Bung Hatta merekonstruksi pemikiran politiknya sejak awal mula perkenalan dengan dunia pergerakan

nasional dengan segala yang melatar belakanginya sampai proses meraih dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Buku otobiografi tiga jilid berjudul *Untuk Negeriku: Sebuah Otobiografi* terbagi menjadi beberapa fase kehidupan Bung Hatta. Pada jilid pertama ditulis dengan periode 1902-1929 berjudul *Bukittinggi-Rotterdam Lewat Betawi* berisi perjalanan hidup Bung Hatta dari masa kecilnya sampai masa kuliahnya di Belanda tahun 1929. Jilid kedua dengan jangka waktu 1929-1942 berjudul *Berjuang dan Dibuang* berisi masa akhir kuliah Hatta di Jakarta hingga akhir masa pembuangan di Banda Neira. Sedangkan pada jilid ketiga yang diberi judul *Menuju Gerbang Kemerdekaan* ditulis dengan latar waktu 1942-1949. Bung Hatta menuliskan mengenai masuknya Jepang ke Banda Neira hingga pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949 pada jilid ketiga ini.

Pemikiran politik dalam *Contemporary Political Science, A Survey of Methods, Research and Teaching* terbitan UNESCO tahun 1950 halaman 4 menjadikan teori politik sebagai bidang pertama dari empat bidang ilmu politik. Miriam Budiardjo mengemukakan bahwa teori politik adalah bahasan sistematis dan generalisasi dari fenomena politik. Menurut Leo Strauss (Suyahmo,2015:44) kajian tentang teori politik merupakan upaya untuk memperoleh pengetahuan murni mengenai dasar-dasar politik. Teori-teori yang masuk dalam kelompok teori politik dibagi menjadi tiga kelompok yaitu filsafat politik, teori politik, dan ideologi politik. Filsafat politik mencari penjelasan berdasarkan rasio adanya hubungan antara sifat dan hakikat dari

alam semesta dengan sikap dan hakikat dari kehidupan politik. Dari filsafat politik inilah lahir pemikiran politik.

Pemikiran politik mengkhususkan diri dalam penyelidikan tentang pemikiran-pemikiran yang terdapat dalam bidang politik. Pemikiran politik sangat erat hubungannya dengan filsafat dan sejarah. Pemikiran politik berkembang dan berubah sesuai dengan waktu dan tempat dimana tiap waktu dan tempat memiliki ciri tersendiri yang mempengaruhi pemikiran politik seseorang.

Munculnya kajian mengenai pemikiran politik sejak era Yunani kuno terus berkembang hingga saat ini, termasuk Indonesia. Sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia disertai dengan adanya ideologi, tujuan negara, dan Undang-Undang Dasar 1945 tidak terlepas dari pemikiran politik para pendiri bangsa. Masing-masing tokoh memiliki pandangan yang berbeda tergantung dari latar belakang sosial, budaya, dan keilmuan dari tokoh-tokoh tersebut. Namun setidaknya pemikiran politik para pendiri bangsa dapat dijadikan landasan berfikir generasi penerus mengenai konsep berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Mengembangkan kajian tentang pemikiran politik Indonesia lama merupakan tugas dan tanggung jawab yang seharusnya diemban oleh ilmuwan politik Indonesia sendiri. Hal ini sudah dirasakan sejak beberapa dekade belakangan ini. Miriam Budiardjo mengemukakan sejak pertengahan tahun 1980-an otoritas ilmu-ilmu sosial di Indonesia amat mendorong usaha oleh ilmuwan Indonesia untuk mengembangkan konsep-konsep politik dari

khazanah kebudayaan Indonesia sendiri. Konsep-konsep tentang kekuasaan, negara, dan kepemimpinan yang terkandung dalam berbagai tradisi dan kebudayaan daerah di Indonesia perlu digali, diwacanakan, dan didokumentasikan sehingga bisa memperkaya pemahaman kita tentang kekayaan kehidupan dan peradaban masyarakat Indonesia di masa lalu. Di samping itu, untuk keperluan empiris, konsep-konsep politik tradisional ini dapat dipilih dan dicari relevansinya dengan kebutuhan pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara di masa sekarang ini. Di samping itu, penggalian konsep-konsep politik Indonesia lama oleh ilmuwan Indonesia sendiri dapat dijadikan sebagai pengimbang terhadap kuatnya dominasi barat dalam pengembangan konsep-konsep ilmu sosial pada umumnya dan konsep-konsep ilmu politik khususnya (Suleman, 2010: 4).

Menurut Sartono Kartodihardjo (1990: xv), identitas dan kepribadian suatu bangsa terkubur dalam sejarah masa lalu bangsa tersebut, khususnya dalam bentuk pemikiran sikap dan perilaku perjuangan yang sudah dirintis oleh para pendiri bangsa. Dengan demikian proses penemuan identitas bangsa hanya dapat dilakukan dengan pemahaman yang baik tentang sejarah perjuangan bangsa, khususnya dengan memahami dan menghayati pemikiran dan perilaku perjuangan para perintis kemerdekaan. Terutama dimaksudkan untuk mengingatkan setiap warga negara Indonesia tentang pentingnya menggali kembali momen-momen sejarah perjuangan nasional agar proses penemuan kembali identitas nasional dan kepribadian bangsa dapat terwujud. Terutama

mengingat pada awal abad 20 merupakan fajar bangkitnya nasionalisme negara-negara asia terutama Indonesia

Penelitian mengenai Bung Hatta ini, penulis menggunakan Buku Untuk Negeriku: Sebuah Otobiografi sebagai sumber utama dalam mengupas pemikiran politik Bung Hatta dari peristiwa yang menjadi latar belakang hingga proses pengembangan dari pemikiran politik tersebut. Hal ini dilakukan karena buku otobiografi ini ditulis beberapa tahun sebelum wafatnya Bung Hatta sedangkan isi buku ditulis hanya sampai tahun 1949.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian teoritis mengenai pemikiran politik Bung Hatta dalam buku otobiografi tiga jilid yang ditulisnya sendiri untuk menjadikan referensi bagi para pembaca dalam mengkaji pemikiran seorang tokoh nasional. Hasil analisisnya dimaksudkan untuk mendorong berbagai kalangan agar semakin tertantang dalam menyampaikan paradigmanya dalam menilai atau mengkritisi suatu filosofis seseorang ataupun peristiwa sejarah yang menyertainya. Selain itu, keteladanan seorang Hatta diharapkan dapat dijadikan tauladan untuk bertindak secara bijaksana, terutama dalam mengambil segala tindakan dan keputusan secara makro maupun mikro. Judul penelitian tersebut adalah **Pemikiran Politik Bung Hatta dalam Buku Tiga Jilid Berjudul: Untuk Negeriku Sebuah Otobiografi (Studi Mengenai Nasionalisme dan Demokrasi).**

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji pemikiran politik Bung Hatta dalam buku yang ditulisnya. Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah yang dapat dituliskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Politik Bung Hatta semasa sekolah?
2. Bagaimana pemikiran politik Bung Hatta semasa Pergerakan Nasional ?
3. Bagaimana pemikiran politik Bung Hatta semasa Revolusi Fisik?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemikiran Politik Bung Hatta semasa Sekolah.
2. Untuk mengetahui pemikiran politik Bung Hatta semasa Pergerakan Nasional.
3. Untuk mengetahui pemikiran politik Bung Hatta semasa Revolusi Fisik.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat yang bisa diperoleh dari hasil penelitian ini, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan mengenai pemikiran politik para tokoh bangsa.

b. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi langkah awal untuk mengkaji pemikiran politik para tokoh bangsa Indonesia khususnya pemikiran politik Bung Hatta.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan menjadi pendorong bagi penulis untuk mengkaji pemikiran politik para tokoh politik lainnya.

b. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi berbagai pihak mengenai pemikiran politik Bung Hatta dalam buku tiga jilid berjudul Untuk Negeriku: Sebuah Otobiografi.

E. Batasan Istilah

Agar tidak terjadi perbedaan penafsiran terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu ditetapkan batasan istilah sebagai berikut:

1. Pemikiran

Pemikiran adalah yang menyebabkan pikiran mendapatkan pengertian baru dengan perantara hal yang sudah diketahui. Yang beraksi dalam pemikiran bukan hanya dalam akal pikiran saja melainkan manusia secara keseluruhan. Proses pemikiran adalah suatu pergerakan mental dari satu

hal menuju hal lain, dari proposisi ke proposisi lainnya dari apa yang sudah diketahui kepada hal yang belum diketahui. Pemikiran masing-masing orang memiliki perbedaan dengan segala ciri khasnya yang juga berbeda-beda sehingga dengan sendirinya terwujud hasil pemikiran dalam berbagai bidang dan timbulnya pemikiran seseorang sebagai reaksi atas pemikiran orang lain.

2. Politik

Politik adalah usaha yang dilakukan warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Jika ditinjau dari sudut pandang yang berbeda politik adalah cara yang digunakan untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Jika merujuk pada pengaturan masyarakat politik berarti hal yang berkaitan dengan pemerintahan dan negara serta perumusan kebijakan publik. Politik diuraikan menjadi sepuluh konsep dasar yaitu Negara, Kekuasaan, Pengambilan Keputusan, Kebijakan, Pembagian atau Alokasi, Sistem Politik, Partai Politik, Perilaku Politik, Partisipasi Politik, serta Politik dan Ekonomi.

3. Pemikiran Politik

Pemikiran politik adalah bagian dari ilmu politik yang mengkhususkan diri dalam penyelidikan tentang pemikiran-pemikiran yang terdapat dalam bidang politik. Pemikiran Politik sangat erat hubungannya dengan filsafat dan sejarah. Pemikiran Politik berkembang dan berubah sesuai dengan waktu dan tempat dimana tiap waktu dan tempat memiliki ciri tersendiri yang mempengaruhi pemikiran politik seseorang. Pemikiran Politik yang

akan dikaji dalam penelitian ini adalah pemikiran yang ditulis dari buku otobiografi yang ditulis sendiri oleh Bung Hatta sebagai tokoh yang akan diteliti sehingga dapat diketahui pemikiran politiknya berdasarkan waktu dan tempat yang ada dalam tulisan tersebut, juga berdasarkan waktu dibuatnya tulisan tersebut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Deskripsi Teoritis

1. Analisis Wacana

a. Bahasa, Analisis Teks, dan Wacana

Bahasa merupakan alat yang digunakan manusia untuk berkomunikasi antara satu dengan lainnya. Adanya bahasa menjadikan informasi yang disampaikan kepada orang lain menjadi lebih efektif. Bahasa baik pemilihan kata maupun unsur gramatika, dipahami sebagai pilihan, mana yang dipilih oleh seseorang untuk diungkapkan membawa makna dan ideologi tertentu. Bahasa adalah suatu sistem kategorisasi, dimana kosakata tertentu dapat dipilih yang akan menyebabkan makna tertentu. Lahirnya makna tidak terlepas dari pemilihan dan penggunaan bahasa yang digunakan penulis untuk mempengaruhi pembacanya (Eriyanto,2005:15).

Halliday (Sobur,2004:17) menyatakan, bahasa memiliki fungsi-fungsi seperti berikut:

1. Fungsi ideasional: Untuk membentuk, mempertahankan, dan memperjelas hubungan di antara anggota masyarakat.
2. Fungsi interpersonal: untuk menyampaikan informasi di antara anggota masyarakat.

3. Fungsi tekstual: untuk menyediakan kerangka, pengorganisasian diskursus atau wacana yang relevan dengan situasi.

Bahasa juga merupakan pandu realitas dunia. Pandangan seseorang tentang dunia dibentuk oleh bahasa dan karena setiap orang memiliki kemampuan berbahasa yang berbeda-beda, maka pandangannya tentang dunia pun berbeda pula. Sobur (2004:88) menyatakan bahwa bahasa mempunyai kekuatan yang begitu dahsyat dan lebih tajam dari sebuah pisau. Bahasa di mulut orang yang tidak beretika merupakan tiran yang sulit diacak dimana dalam bahasa itu sendiri, yang hanya berbunyi grafis atau tanda grafis, membuat orang kejatuhan atau bahkan bunuh diri.

Selain bahasa terdapat pula istilah teks dan wacana. Dede Oetomo (Mulyana,2005:9), istilah teks lebih dekat pemaknaannya dengan bahasa tulis dan wacana pada bahasa lisan. Van Dyk (PWJ Nababan,1987:64) menyatakan, teks lebih bersifat konseptual. Dalam pandangan Halliday (Santoso, 2008: 2), teks dimaknai secara dinamis. Teks adalah bahasa yang sedang melaksanakan tugas tertentu dalam konteks situasi. Kemudian berkembang pemahaman mengenai teks lisan dan teks tulis, istilah-istilah yang sama persis dengan wacana lisan dan wacana tulisan. Sedangkan Wodak (Titscher dkk, 2000:39) teks dibagi menjadi empat ragam yaitu, a) Ragam Teks Naratif (kisah, cerita, dan sebagainya), b) Ragam Teks Argumentatif (penjelasan, artikel ilmiah, dan sebagainya), c) Ragam Deskriptif Kebanyakan Menggunakan Unsur Lokal, d) Ragam Teks Instruktif Seperti Buku yang Bersifat Argumentatif dan Numeratif.

Pengertian teks dan wacana yang masih tumpang tindih kemudian dijabarkan oleh Van Dyk (Badara,2012:17) yang mengemukakan bahwa wacana sebenarnya adalah bangun teoritis yang abstrak, adapun perwujudan bahasa adalah teks. Pengertian mengenai wacana sendiri sangat beragam, karena wacana sendiri digunakan di berbagai disiplin ilmu seperti wacana politik, sosial, ekonomi, budaya, sastra, dan sebagainya.

Stefan Titscher dkk (2000: 55) membagi teks dalam dua fungsi. Pertama, fungsi teks sebagai teks dan kedua fungsi teks sebagai representasi. Fungsi kedua ini kemudian dibagi menjadi dua yaitu dari ciri kelompok yang diteliti dan dari situasi yang diteliti. Berdasarkan penjelasan Titscher di atas terdapat perbedaan antara teks dengan materi penelitian. Pada fungsi pertama dapat disimpulkan bahwa teks itu sendiri merupakan obyek penelitian. Sedangkan fungsi kedua poin pertama, teks disusun berdasarkan beberapa proposisi ciri kelompok yang diteliti yang kemudian dianalisis dan menjadi sebuah wacana. Berdasarkan fungsi kedua poin kedua, teks bisa didekati sebagai sebuah refleksi komunikasi yang kentara dan menjadi indikator yang memungkinkan dilakukannya analisis terhadap situasi komunikatif yang ada yang kemudian bisa menimbulkan wacana.

Anton M. Moeliono (Mulyana,2005:5) mendefinisikan wacana sebagai rentetan kalimat yang berkaitan, yang menghubungkan proposisi yang satu dengan lainnya dalam kesatuan makna. Wacana juga berarti satuan bahasa terlengkap yang dalam hirarki kebahasaan merupakan satuan gramatikal tertinggi dan terbesar. Definisi lain dikemukakan Cook (1989:6-7) yang

menyatakan wacana adalah suatu penggunaan bahasa dalam komunikasi baik secara lisan maupun tulisan.

Guy Cook (Eriyanto,2005:9) menyebut tiga hal yang menjadi sentral dalam pengertian wacana, yaitu teks, konteks, dan wacana. Teks adalah semua bentuk bahasa, bukan hanya kata-kata yang tercetak di kertas, tetapi juga semua jenis ekspresi komunikasi, ucapan, musik, gambar, suara, dan lain-lain. Konteks memasukkan semua situasi dan hal yang berada di luar teks dan mempengaruhi pemakaian bahasa, seperti partisan dalam bahasa, situasi dimana teks tersebut diproduksi, fungsi yang dimaksudkan, dan lain sebagainya. Wacana kemudian dimaknai sebagai teks dan konteks secara bersama-sama dalam suatu proses komunikasi.

Mulyana (2005: 25) membagi wacana dalam dua aspek, yaitu aspek kohesi dan koherensi. Kohesi dalam wacana diartikan sebagai kepaduan bentuk yang secara struktural membentuk ikatan sintaktikal. Halliday (Sobur, 2014) membagi kohesi wacana menjadi dua yaitu: a) kohesi gramatikal yang berisi referensi, substitusi, elipsis, konjungsi, dan b) kohesi leksikal yang berisi sinonim, repetisi, dan kolokasi. Koherensi mengandung makna 'pertalian' yang dalam konsep kewacanaan berarti pertalian makna atau isi kalimat. HS Wahjudi (Mulyana, 2005: 30) berpendapat bahwa hubungan koherensi ialah keterkaitan antara bagian yang satu dengan bagian lainnya, sehingga kalimat memiliki kesatuan makna yang utuh. Berdasarkan dua aspek tersebut, wacana akan menjadi utuh apabila terdapat aspek kohesi dan koherensi. Perbedaan diantara dua aspek tersebut adalah pada sisi titik dukung terhadap struktur

wacana. Artinya dari arah mana aspek itu mendukung keutuhan wacana. Bila dari dalam maka disebut kohesi. Sedangkan bila aspek tersebut berasal dari luar maka disebut dengan koherensi.

Interpretasi terhadap wacana dan teks menurut Triyuwono (Bungin, 2015:161) memiliki kepentingan sejajar, yaitu tidak ada superioritas antara satu dengan yang lain. Artinya bukan benar tidaknya tafsiran yang diberikan, tetapi argumentasi yang dijadikan landasan dalam memberikan penafsiran serta kedekatannya dengan fenomena yang berkaitan dengan teks tersebut yang menjadi titik perhatian interpretasi. Interpretasi terhadap teks ditekankan pada bagaimana peneliti melihat keajegan isi komunikasi, membaca simbol-simbol, memaknakan isi interaksi simbolik yang terjadi dalam komunikasi (Bungin, 2015: 161).

Pada teori independensi teks dikemukakan Karl Popper (Al-zastrow, 1999:3) menyatakan bahwa setiap monopoli pengarang dan penggagas sebuah teks, lalu masuk ke dalam dunia pengetahuan obyektik, maka teks itu menjadi otonom dan tidak lagi bergantung pada orang yang semula menggagas dan mengeluarkannya. Tafsiran terhadap sesuatu yang diumumkan dapat saja berbeda dari apa yang semula diniatkan dan dimaksudkan oleh penggagasnya.

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa bahasa, teks, dan wacana memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Bahasa dapat diwujudkan dalam teks dan wacana. Teks adalah setiap bentuk bahasa yang dituliskan. Sedangkan wacana adalah suatu

penggunaan bahasa dalam komunikasi yang melibatkan teks dan konteks yang disusun secara kohesi dan koheren. Kaitannya dalam penelitian ini, teks dalam suatu wacana dapat melahirkan interpretasi dan makna yang berbeda-beda dari setiap pembaca. Teks dalam buku tiga jilid berjudul Untuk Negeriku: Sebuah Otobiografi dapat membentuk pemikiran dan pandangan dari Muhammad Hatta, walaupun dalam analisis yang dibuat akan berbeda-beda bergantung siapa yang melakukan analisis tersebut.

b. Pengertian Analisis Wacana

Penafsiran sebuah teks pada dasarnya adalah untuk mendapatkan makna-makna dalam materi teks tersebut, penelitian yang mengkaji teks semestinya mampu mengungkap makna yang terkandung pada teks tersebut. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah analisis wacana.

Sebelum munculnya analisis wacana sebagai disiplin ilmu, tercatat kajian tata bahasa masih berkuat di seputar kalimat dengan menggunakan analisis isi. Analisis isi konvensional pada umumnya hanya dapat digunakan untuk membedah muatan teks yang sifatnya nyata. Masih banyak persoalan dalam analisis teks yang tersembunyi pada muatan teks tersebut. Penggunaan dalam penelitian kualitatif, analisis isi lebih ditekankan pada bagaimana simbol-simbol yang ada pada komunikasi itu terbaca dan dianalisis oleh peneliti. Kekurangannya, analisis isi hanya mempertimbangkan apa yang dikatakan seseorang tetapi tidak menyelidiki bagaimana orang itu mengatakannya. Dalam

kenyataannya yang penting bukan apa yang dikatakan seseorang tetapi bagaimana dan dengan cara apa dikatakan (Bungin, 2015:164).

Analisis Wacana adalah ilmu baru yang muncul beberapa puluh tahun belakangan ini. Aliran-aliran linguistik selama ini membatasi penganalisisnya hanya pada soal kalimat dan baru belakangan ini sebagian ahli memalingkan perhatiannya pada analisis wacana (Lubis, 1993:12). Menurut Stubs dan Cook (Badara, 2012: 18), analisis wacana adalah sebagai suatu kajian yang meneliti atau menganalisis bahasa yang digunakan secara alamiah, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Selanjutnya, Stubs menjelaskan analisis wacana menekankan kajian penggunaan bahasa dalam konteks. Berdasarkan pernyataan-pernyataan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa analisis wacana dalam penelitian ini adalah kajian mengenai berbagai simbol bahasa yang ditulis oleh pembuat teks dan ditafsirkan dari berbagai sudut pandang.

c. Metode Analisis Wacana Deskriptif

Menurut Arikunto (Mulyana, 2005: 83), Metode deskriptif dapat digunakan untuk memberikan, menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan fenomena objek penelitian. Berdasarkan kajiannya, metode ini menjelaskan data atau objek secara natural, objektif, dan faktual.

Wacana deskriptif berupa rangkaian tuturan yang memaparkan sesuatu atau melukiskan sesuatu baik berdasarkan pengalaman maupun pengetahuan penuturnya. Tujuan yang ingin dicapai oleh wacana ini adalah tercapainya penghayatan yang agak imajinatif terhadap sesuatu, sehingga pendengar atau

pembaca merasa seolah-olah dia sendiri mengalami atau mengetahuinya secara langsung. Beberapa peneliti deskriptif umumnya akan mencari, memutuskan, dan kemudian mengumpulkan wacana-wacana yang ada dalam teks.

Mulyana (2005: 84) memberikan langkah-langkah analisis deskriptif yang dapat dilakukan untuk menganalisis wacana dalam teks yaitu:

- a) Memilih dan menentukan jenis wacana yang akan diteliti.
- b) Menentukan unit analisis, jenis wacana yang telah ditetapkan untuk diteliti, segera dipilah dan ditentukan satuan data yang akan dijadikan dasar analisis.
- c) Mendeskripsikan satuan data.

d. Hermeneutika

Kata hermeneutika (*hermeneutics*) berasal dari bahasa Yunani, *hermeneutice* atau *hermeneuticos*. Kata *hermeneutikos* sendiri dibentuk dari perkataan *hermeneuin* yang harfiahnya ialah penafsiran (W.M.,2008-26), Rahardjo (2012:12) menyatakan bahwa istilah tersebut dalam berbagai bentuknya dapat dibaca disejumlah literatur peninggalan Yunani kuno, seperti yang digunakan oleh Aristoteles dalam sebuah risalahnya *Peri Hermeneias* (Tentang Penafsiran). Ebiling (Rahardjo,2012:27) lebih lanjut mengemukakan bahwa interpretasi yang banyak dikutip mengenai proses penerjemahan dilakukan oleh Hermes. Hermes adalah tokoh mitologi dari Yunani yang dititahkan oleh Zeus untuk menyampaikan pesan para dewa dikayangan kepada manusia di bumi. Tugas Hermes sebagai utusan dewa sangat penting dan berat. Jika saja

terjadi kesalahan dalam menerjemahkan atau menafsirkan pesan dewa dalam bahasa manusia, akibatnya akan fatal. salah arti akan timbul menyebabkan manusia akan pula hidup di jalan sesat. untuk dapat melakukan tugasnya dengan baik, hermes dituntut menguasai pesan para dewa, maksud dan tujuan dari pesan itu, dan untuk keperluan apa itu disampaikan, serta dalam situasi apa . agar dapat menyampaikan. pesan dewa dengan baik. Hermes harus menguasai bahasa manusia dan mampu mengurai pesan yang harus disampaikan secara artikulatif melalui bahasa yang dikuasainya. (W.M., 2008:27) Tugas Hermes tersebut menurut Ebeling mengandung tiga makna hermeneutis yang mendasar, yaitu a) Mengungkapkan sesuatu yang tadinya masih dalam pikiran melalui kata-kata sebagai media penyampaian; b) Menjelaskan secara rasional secara yang masih samar-samar sehingga maknanya dapat dimengerti; c) Menerjemahkan suatu bahasa yang asing ke dalam bahasa lain yang lebih dikuasai oleh pemirsa. Tiga pengertian tersebut terangkum dalam pengertian “Menafsirkan” (*interpreting understanding*). Segala sesuatu yang masih membutuhkan pengungkapan secara lisan, penjelasan yang masuk akal, dan penerjemah bahasa, pada dasarnya mengandung proses memberi pemahaman atau dengan kata lain menafsirkan (W.M., 2008:27).

Hermeneutika merupakan proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti (Sumaryono, 1992:24) dalam definisi yang agak berbeda, dapat dikatakan bahwa hermeneutika sebagai sebuah metode atau cara untuk menafsirkan simbol berupa teks atau sesuai yang diperlukan sebagai teks untuk dicari arti dan maknanya, dimana metode ini mensyaratkan

adanya kemampuan untuk menafsirkan masa lampau yang tidak dialami, kemudian dibawa ke masa sekarang (Faiz :2003:9).

Hermeneutika sebagai sebuah metode penafsiran tidak hanya memandang teks, tetapi hal yang tidak dapat ditinggalkan adalah juga berusaha menyelami kandungan makna literalnya. Lebih dari itu, ia berusaha menggali makna dengan mempertimbangkan horizon-horizon yang melingkupi teks tersebut, baik-baik horizon pengarang, horizon pembaca, maupun dari horizon itu sendiri. Memperhatikan ketiga horizon tersebut diharapkan upaya pemahaman dan penafsiran yang dilakukan akan menjadi kegiatan rekonstruksi dan reproduksi makna teks, selain melacak bagaimana suatu teks dimunculkan oleh pengarangnya dan muatan apa yang masuk dan ingin dimasukkan pengarang kedalam teks, sebuah aktivitas penafsiran sesungguhnya berusaha melahirkan kembali makna sesuai dengan situasi dan kondisi saat teks dibaca dan dipahami. Hal ini dengan kata lain, sebagai sebuah metode penafsiran, yaitu teks, konteks, dan kontekstualisasi (W.M.,2008:28).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kaitannya dengan penelitian adalah hermeneutika dipahami sebagai suatu metode untuk menafsirkan teks dengan memperhatikan konteks dan kontekstualisasi. Konteks akan sangat berpengaruh untuk menghasilkan makna, sebab kontekslah yang menentukan makna teks, bagaimana teks tersebut harus dibaca dan seberapa jauh teks tersebut harus dipahami.

2. Pemikiran Politik

a. Pemikiran

Pemikiran dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Inference*, yang berarti mengeluarkan suatu hasil berupa kesimpulan dimana yang beraksi dalam pemikiran, bukan hanya pikiran atau akal budi saja tetapi sesungguhnya manusia secara keseluruhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 1073) pemikiran adalah proses perbuatan memikirkan yang memerlukan pemecahan. Sedangkan menurut Suyahmo (2014: 4), proses pemikiran adalah suatu pergerakan mental dari satu hal menuju hal lain, dari proposisi satu ke proposisi ke proposisi lainnya dari apa yang sudah diketahui kepada hal yang yang belum diketahui.

Semua manusia hidup yang normal senantiasa ditandai dengan kegiatan-kegiatannya yang sangat khas yaitu kegiatan berfikir. Maka kegiatan berfikir inilah yang membedakan makhluk manusia dengan makhluk lain. Menurut Kaelan (2002: 11), berfikir yang senantiasa berkaitan dengan masalah-masalah manusia yang bersifat aktual dan hakiki disebut berfikir secara kefilosofan. Maka tidak semua pemikiran manusia merupakan hasil pemikiran kefilosofan. Berfikir kefilosofan bukan hanya merenung yang tidak ada kaitannya dengan realitas kehidupan, namun pemikiran kefilosofan mengacu pada peristiwa-peristiwa kongkrit. Pemikiran masing-masing orang memiliki perbedaan dengan segala ciri khasnya yang juga berbeda-beda sehingga dengan sendirinya terwujud hasil pemikiran dalam berbagai bidang dan timbulnya pemikiran seseorang sebagai reaksi atas pemikiran orang lain.

Pemikiran sangat erat kaitannya dengan logika. Munculnya pemikiran seseorang dipengaruhi oleh logika pemikiran dari orang tersebut yang dipengaruhi dua faktor. Faktor pertama, pemikiran seseorang terhadap suatu obyek tertentu dapat muncul atas interpretasinya sendiri tanpa adanya pemikiran orang lain yang mempengaruhinya. Faktor kedua, pemikiran seseorang terhadap suatu obyek tertentu dipengaruhi oleh orang lain, dalam hal ini penafsiran seseorang atas obyek tertentu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang bisa saja lebih dari satu orang yang memberi pengaruh baik langsung maupun tidak langsung.

Menurut Kaelan (2002: 12-19) terdapat 10 ciri kegiatan berfikir secara kefilosofan sebagai berikut:

- Bersifat kritis, yaitu senantiasa mempertanyakan segala sesuatu, problema-problema, atau hal-hal lain yang sedang dihadapi oleh manusia sehingga ciri berfikir kefilosofan bersifat diamis.
- Bersifat mendalam, yaitu pemikiran bukan hanya sampai fakta-fakta yang sifatnya sangat khusus dan empiris belaka namun sampai intinya yang terdalam yaitu substansinya secara universal.
- Bersifat konseptual, yaitu pemikiran yang berkaitan dengan masalah-masalah yang kongkrit yang dihadapi oleh manusia, kemudian dengan generalisasi dan abstraksi maka sampailah pada suatu kesimpulan yang bersifat konseptual.
- Koheren, yaitu berfikir secara kefilosofan bukanlah merupakan suatu pemikiran yang acak, kacau, dan fragmentaris. Pemikiran kefilosofan

berusaha menyusun suatu bagan yang konseptual dan runtut atau koheren. Tidak terdapat pertentangan dan terdapat suatu hubungan.

- Bersifat Rasional, yaitu ciri pemikiran yang berusaha menyusun bagan konseptual yang rasional, yaitu bagan yang bagian-bagiannya berhubungan secara logis diantara satu dengan lainnya. Namun, rasional dalam pemikiran kefilosofan adalah terbuka terhadap kritik.
- Bersifat Komprehensif, yaitu pemikiran kefilosofan bukan hanya berdasarkan pada suatu fakta yang khusus dan individual saja, yang kemudian sampai pada kesimpulan yang khusus dan individual juga, namun pemikiran harus sampai pada kesimpulan yang sifatnya paling umum, artinya tidak ada sesuatupun yang berada di luar jangkauannya.
- Bersifat Universal, yaitu pemikiran yang telah sampai pada suatu kesimpulan yang bersifat umum bagi seluruh umat manusia dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun.
- Bersifat Spekulatif, yaitu pengajuan dugaan-dugaan yang masuk akal yang melampaui batas-batas fakta. Tujuannya adalah penyatupaduan dari semua pengetahuan, pemikiran, dan pengalaman manusia menjadi suatu pandangan yang komprehensif.
- Bersifat Sistematis, yaitu pemikiran kefilosofan senantiasa memiliki bagian-bagian dan diantara bagian-bagian tersebut senantiasa berhubungan antara satu dengan lainnya. Hubungan tersebut terjalin dalam suatu kerjasama yang saling ketergantungan.

- Bersifat Bebas, yaitu berfikir secara bebas untuk sampai pada hakikat yang terdalam dan universal sehingga ciri kreativitas senantiasa ada dalam cara berfikir kefilosofan.

b. Pemikiran Politik

Secara etimologi Politik dalam bahasa Arabnya disebut *Siyasah* yang kemudian diterjemahkan menjadi *siasat* dan dalam Bahasa Inggrisnya disebut *Politics*. Politik secara bahasa berarti cerdas dan bijaksana (Kencana, 2010: 9). Hussein Munaf dalam ensiklopedia Indonesia (Putra, 2008: 109) menyatakan bahwa perkataan politik dikenal dalam bahasa Latin sebagai *polhica*, dalam bahasa Yunani *politikus*, dalam bahasa Belanda *politiek*, dalam bahasa Perancis sebagai *politique*, dalam bahasa Inggris sebagai *politics* dan dalam bahasa Arab sebagai *siyasah*. Jika perkataan politik sudah muncul sejak zaman Yunani, maka istilah *siyasah* dalam bahasa Arab juga muncul serentak dengan kelahiran negara Islam di Madinah. Sedangkan kata *siyasah* pada mulanya diartikan sebagai usaha dan ikhtiar untuk mencapai atau menyelesaikan suatu masalah. Dan juga bermaksud pengurusan pemerintahan.

Menurut Miriam Budiardjo (2008:15) Politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Usaha menggapai *the good life* ini menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem, serta cara-cara melaksanakan tujuan itu. Masyarakat mengambil keputusan mengenai

apakah yang menjadi tujuan dari sistem, serta cara-cara melaksanakan tujuan itu diantara beberapa alternatif dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan tersebut.

Sedangkan Ramlan Surbakti (1999:1) menyatakan bahwa politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.

Berdasarkan definisi-definisi mengenai politik di atas, maka politik dapat dibagi menjadi beberapa konsep-konsep dasar sebagai berikut:

- Negara

Menurut Miriam Budiardjo (2008:17), negara merupakan suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Negara sendiri memiliki unsur-unsur yang menjadi syarat berdirinya negara tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah wilayah, rakyat, adanya pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain.

- Kekuasaan

Merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi perilaku individu atau kelompok lain agar sesuai dengan keinginan para pelaku. Berdasarkan konteks politik, kekuasaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan meraih dan mempertahankan

kekuasaan. Kekuasaan dipengaruhi oleh tujuan bersama antara pemegang kekuasaan dengan rakyat atau kelompoknya.

- Pengambilan Keputusan

Menurut Miriam Budiardjo (2008:17), keputusan merupakan hasil akhir pilihan dari beberapa alternatif. Pengambilan keputusan menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok dari politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif dan mengikat seluruh masyarakat. Pengambilan keputusan dapat diambil melalui voting ataupun musyawarah mufakat. Keputusan yang diambil tersebut dapat menyangkut tujuan masyarakat dan dapat pula menyangkut kebijakan untuk mencapai tujuan itu.

- Kebijakan Umum

Merupakan kumpulan keputusan yang diambil oleh pelaku politik baik individu ataupun kelompok. Kebijakan ini diambil sesuai dengan keinginan pihak-pihak yang membuat kebijakan tersebut. Para pembuat kebijakan sendiri merupakan para pemegang kekuasaan yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan kebijakan.

- Pembagian atau Alokasi

Merupakan pembagian dan penjatahan dari nilai-nilai dalam masyarakat. Berdasarkan konteks politik menurut Harold Laswell (1972), nilai-nilai ini terkait dengan who, get, what, when, how. Sehingga seringkali nilai atau alokasi dalam masyarakat tidak merata.

- Sistem Politik

Suatu sistem selalu terkait dengan keadaan dimana bagiannya satu sama lain bergantung secara fungsional, yang mempunyai batas-batas tertentu tapi merupakan komponen daripada suatu keutuhan yang bulat. Jika salah satu komponen itu berubah maka bagian-bagian lainnya pasti berubah. Menurut Rahman (2002: 2), Suatu sistem politik terdiri dari interaksi peranan para warga negara. Orang yang sama dalam sistem politik dapat sekaligus memainkan peranan lain seperti dalam sistem ekonomi, sosial dan lainnya. Sistem juga selalu dimulai dari satu tempat dan diakhiri ditempat lain. Kalau dikaitkan langsung dengan sistem politik bukanlah pekerjaan gampang, sebab sistem politik bukan diatur oleh perorangan melainkan peranan yang telah melembaga. Pada setiap sistem politik akan ditemui berbagai struktur politik. Struktur politik adalah suatu cara bagaimana sesuatu itu disusun atau dibangun yang saling berhubungan antara orang seorang dan organisasi.

Fungsi sistem politik terbagi menjadi fungsi input dan output. Menurut Antonius Sitepu (Simbolon, 2008: 26), fungsi input sistem politik adalah sebagai suatu yang menunjukkan berbagai efektifitas yang memungkinkan suatu sistem berjalan yang pada umumnya dimanifestasikan melalui dukungan dan tuntutan demi kelangsungan sistem politik itu sendiri. Sedangkan fungsi output sistem politik adalah pembuatan-pembuatan peraturan dan kebijakan dalam sistem politik.

Ramlan Surbakti (1999: 221-232) membagi sistem politik menjadi lima model yaitu Sistem Politik Otokrasi Tradisional, Sistem Politik Totaliter,

Sistem Politik Komunis, Sistem Politik Demokrasi, dan Sistem Politik Negara Berkembang.

- Partai Politik

Partai politik merupakan organisasi politik yang memberikan jalan bagi anggota atau kadernya untuk berkompetisi memperoleh suara rakyat guna mengisi jabatan-jabatan politik. Pihak yang dipinang oleh partai untuk mengisi jabatan-jabatan politik, publik, administratif dapat berasal dari kalangan partai maupaun dari luar partai yang berkomitmen terhadap partai atau setidaknya yang dapat menguntungkan masa depan partai (Handoyo, 2010: 143).

Partai Politik memiliki fungsi utama yaitu meraih dan mempertahankan kekuasaan agar dapat menjalankan program-program partai sesuai dengan ideologi partai. Selain itu menurut Surbakti (1999: 144-154), terdapat pula fungsi-fungsi lain yaitu:

Pertama, Sosialisasi Politik, yaitu proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat sehingga anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat.

Kedua, Rekrutmen Politik yaitu pemilihan dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam siste politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya.

Ketiga, Partisipasi Politik, yaitu kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan ikut dalam menentukan pemimpin pemerintahan.

Keempat, Pemandu Kepentingan, yaitu menampung, menganalisis, dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan menjadi alternatif kebijakan umum untuk diperjuangkan dalam proses pembuatan keputusan politik.

Kelima, Komunikasi Politik, yaitu fungsi partai politik dalam proses penyampaian keputusan dan penjelasan pemerintah kepada masyarakat sekaligus menyampaikan aspirasi dan kepentingan berbagai kelompok masyarakat kepada pemerintah.

Keenam, Pengendali Konflik, yaitu fungsi Partai Politik dalam menyelesaikan konflik dari berbagai pihak yang berkonflik dengan memadukan dan menampung berbagai aspirasi dan kepentingan kepada Lembaga Perwakilan Rakyat untuk dijadikan keputusan politik.

Ketujuh, Kontrol Politik, yaitu fungsi Partai Politik untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan, dan penyimpangan dari suatu kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah.

Tipologi Partai Politik terdapat bermacam-macam diantaranya otoriter dan demokrasi; integratif dan representatif; ideologis dan pragmatis; agamis dan sekuler; demokratis dan revolusioneris; massa dan elit; deokratis dan oligarki. Dalam hal kepartaian klasifikasi yang paling umum berdasarkan pada banyaknya partai politik; sifat kenaggotaan tertutup atau

kompetitif; majemuk atau monopolistik; dan orientasi pada isu atau pada klien (Amal, 1988: 29).

- Perilaku Politik

Menurut Surbakti (1999: 167), Perilaku Politik dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Terdapat tiga bagian dari individu yang melakukan perilaku politik, yaitu individu sebagai aktor politik, individu sebagai aktivis politik, dan individu sebagai warga negara biasa. Menurut Smith (Surbakti, 1991: 169), terdapat empat faktor yang mempengaruhi perilaku politik seorang aktor politik yaitu:

Pertama, Lingkungan sosial politik tak langsung seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya, dan media massa.

Kedua, Lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian seorang aktor politik seperti keluarga, agama, sekolah, dan kelompok pergaulan.

Ketiga, Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu. Hal ini dipengaruhi oleh fungsi kepentingan yaitu penilaian seseorang terhadap suatu obyek ditentukan oleh minat dan kebutuhan terhadap obyek tersebut, fungsi penyesuaian diri yaitu penilaian terhadap suatu obyek ditentukan oleh keinginan yang sesuai dengan obyek tersebut, dan fungsi eksternalisasi dan pertahanan diri yaitu penilaian seseorang atas suatu obyek dipengaruhi oleh keinginan mengatasi tekanan dalam batin yang berwujud pada eksternalisasi diri dan pertahanan diri.

Keempat, Faktor lingkungan yang dibagi menjadi dua yaitu faktor lingkungan sosial politik langsung berupa situasi yang mempengaruhi aktor politik secara langsung untuk melakukan suatu kegiatan seperti keadaan keluarga, suasana kelompok, dan ancaman. Sedangkan faktor lingkungan politik sosial tidak langsung mempengaruhi lingkungan sosial politik berupa sosialisasi, internalisasi, dan politisasi.

- Partisipasi Politik

Menurut Faulks (Handoyo, 2010: 227) Partisipasi Politik adalah keterlibatan aktif individu maupun kelompok dalam proses pemerintahan yang berdampak pada kehidupan mereka. Hal ini mencakup keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik baik langsung maupun tidak langsung. Partisipasi Politik ini merupakan proses aktif, di mana seseorang dapat saja menjadi anggota sebuah partai atau pressure group namun tidak memainkan peran aktif dalam organisasi.

Partisipasi Politik sangat erat sekali kaitannya dengan kesadaran politik. Semakin sadar bahwa warga negara diperintah maka semakin besar pula warga negara menuntut diberikan hak suara dalam pemerintahan (Budiarto, 2008: 369).

Gabriel Almond membagi bentuk Partisipasi Politik menjadi dua bagian yaitu konvensional dan non konvensional. Bentuk partisipasi politik konvensional adalah voting, diskusi politik, kelompok kepentingan, komunikasi individual, dan lain sebagainya. Sedangkan partisipasi politik

non konvensional meliputi pengajuan petisi, demonstrasi, mogok, kudeta, perang, kekerasan politik, dan lain sebagainya (Handoyo, 2010: 233).

Negara Demokrasi menjadikan Partisipasi Politik sebagai hak warga negara. kenyataannya tingkat Partisipasi Politik warga negara berbeda-beda di tiap negara. hal ini didorong oleh 4 tipe seperti yang dijelaskan Ramlan Surbakti (1999: 184-185). Empat faktor tersebut adalah tingkat kepercayaan tinggi aktif, tingkat kepercayaan rendah, tipe militan radikal, dan tipe partisipasi pasif.

- Politik dan Ekonomi

Setiap individu dan masyarakat berupaya mendapatkan sumber-sumber guna memenuhi kebutuhan hidup sehingga dapat hidup secara layak. Kegiatan ekonomi masyarakat yaitu kegiatan memenuhi kebutuhan rumah tangga bagi individu dan memenuhi kebutuhan nasional bagi masyarakat. kegiatan ekonomi pada dasarnya berkisar pada kegiatan memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa. Menurut Ramlan (1999: 212), negara berkaitan erat dengan ekonomi dalam hal peranan negara pada perencanaan dan koordinasi ekonomi serta kepemilikan barang dan jasa dalam berbagai sistem ekonomi baik itu sosialis, komunis, sistem ekonomi pasar, ataupun sistem kapitalisme. Peranan besar negara terhadap jalannya ekonomi membuat negara sebagai bagian dari politik membuat kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi merupakan keputusan politik yang mempengaruhi distribusi kekayaan dan pendapatan dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, jika dilihat dari dua pengertian politik dan pemikiran maka dapat disimpulkan bahwa pemikiran politik adalah konsep penyelidikan yang mengkhuskan diri pada pencarian solusi dari permasalahan politik yang mencakup konsep-konsep tentang politik untuk mencapai tujuan dari politik itu sendiri.

Pemikiran politik yang berkembang sampai saat ini sebenarnya diilhami oleh pemikiran Yunani Kuno. Sebagaimana yang terekam dalam sejarah bahwa konsepsi politik dan sosial yang berkembang di dunia barat itu sebagai warisan dari pemikiran dan kebudayaan Yunani Kuno. Warisan itu berupa ide pemerintahan demokratis yang berisi nilai-nilai kebebasan manusia, keadilan, hak-hak individu, yang semuanya itu berupaya untuk ditanamkan dan dipelihara dalam peradaban Barat (Suyahmo, 2014: 54). Kajian pemikiran politik sendiri terbagi menjadi beberapa masa, yaitu masa klasik, masa pertengahan, dan masa modern.

- **Pemikiran Politik Klasik**

Yunani merupakan salah satu bangsa yang mempunyai peradaban tinggi dan para pemikir ulung yang telah memberikan berbagai pemahaman di bidang politik maupun pengetahuan lainnya dengan mengembangkan berbagai bentuk pemikiran sehingga menghasilkan pemahaman yang dibutuhkan oleh para pemikir politik lain. Para pemikir politik Yunani lebih sering menggunakan filsafat sebagai pedoman pembahasan pemikiran politiknya. Pemikiran Politik Yunani secara sistematis menyelidiki watak dari jalannya institusi politik. Pada masa selanjutnya

hasil Pemikiran Politik Yunani sangat berpengaruh terhadap bagi kebudayaan dan intelektual dunia barat maupun islam.

Tokoh pemikir politik terkemuka era Yunani Kuno adalah Socrates. Doktrin politik Socrates bahwa kebijakan adalah pengetahuan merupakan dasar pemikiran politik Socrates mengenai negara. Socrates tidak terlalu banyak menulis mengenai pandangan politiknya namun dengan konsep pemikiran Socrates tersebut telah melahirkan banyak pemikir Yunani lain, diantaranya adalah Plato. Socrates mencurahkan perhatiannya secara sungguh-sungguh pada perkembangan metodologi untuk mencapai kebenaran. Bagi Socrates (Rapar, 1996: 100), prinsip politik juga mendasarkan pada etika yang disimpulkan kebijakan pengetahuan. Menurut Socrates terdapat prinsip-prinsip moralitas yang tidak berubah dan universal yang terdapat pada hukum-hukum dan tradisi-tradisi yang beragam di berbagai belahan dunia. Socrates menegaskan bahwa norma-norma kebenaran itu bebas dan penting untuk opini individu. Mengenai negara menurut Socrates, negara adalah memajukan kebahagiaan para warga negaranya dan membuat jiwa mereka menjadi sebaik mungkin. Socrates juga tidak menyetujui konsep Demokrasi yang didasarkan pada suara mayoritas karena menurutnya tidak semua orang dalam mayoritas memiliki pengetahuan baik.

Setelah kematian Socrates yang terkenal dengan pemikirannya tentang suatu kebijakan (virtue). Pemikiran Socrates diturunkan oleh seorang muridnya yang bernama Plato. Plato merupakan murid setia Socrates yang

banyak mewarisi keilmuan dan filsafat Socrates. Menurut Plato Negara ideal menganut prinsip mementingkan kebajikan. Karena kebajikan menurut plato sebuah pengetahuan. Segala hal yang dilakukan atas nama Negara haruslah dimaksudkan untuk mencapai kebajikan itu. Berdasarkan karyanya yang berjudul *Republic* (Osborne, 2001: 15), Plato menggariskan mengenai negara kota idealnya, Plato menggabungkan kekuasaan absolut dengan kekuasaan orang banyak, yang merupakan campuran antara monarki dengan demokrasi. Terdapat empat konsep fundamental yang menjadi dasar pemikiran politik Plato, yaitu, 1) kebajikan adalah pengetahuan, 2) Manusia mempunyai bakat, kecerdasan, dan kemampuan yang tidak sama, 3) Negara adalah lembaga yang alami dan 4) Tujuan masyarakat Politik adalah kebaikan bersama.

Pemikiran Politik Plato kemudian dikembangkan lagi oleh Aristoteles. Kemunculan negara menurut Aristoteles tidak dapat dipisahkan dari watak manusia sendiri atau ini merupakan insting sosial seseorang. Karena itu penyebutan manusia adalah *zoon politikon* atau makhluk berpolitik. Dengan definisi seperti ini, sebuah negara merupakan kepastian, karena merupakan sebuah sarana agar makhluk berpolitik tersebut dapat berinteraksi dan beraktualisasi (Osborne, 2001: 17). Negara ideal menurut Aristoteles (Suhelmi, 2001: 45) adalah polis atau negara kota. Negara bentuk polis memiliki bayangan sebuah negara yang tidak terlalu besar dan kecil. Tentang kekuasaan negara polis, Aristoteles berpendapat bahwa karena negara merupakan tingkat tertinggi maka ia memiliki kekuasaan

mutlak atau absolut. Dalam karyanya yang berjudul *Politics* (Oxford University, 1995), menetapkan beberapa bentuk negara yaitu: Negara monarki, apabila kekuasaan di tangan satu orang, bertujuan untuk kebaikan dan kesejahteraan semua. Kedua, adalah bentuk aristokrasi di mana kekuasaan negara dipegang oleh beberapa orang dan bertujuan baik demi kepentingan umum. Ketiga adalah oligarki di mana kekuasaan kelompok kaya menjadi dominan dan penyaluran pada masyarakat umum menjadi terhambat.

- **Pemikiran Politik Abad Pertengahan**

Pemikiran politik abad pertengahan pada awalnya sangat dipengaruhi oleh agama, banyak muncul pemikiran politik dari pemikir-pemikir Nasrani seperti Thomas Aquinas dan dari Islam seperti Al Mawardi. Pada akhir abad pertengahan mulai muncul pemikiran politik yang menolak tradisi politik abad pertengahan seperti Machiavelli dan Martin Luther.

Sejak abad keempat pemikiran kristiani di Eropa Barat sangat dipengaruhi sosok Agustinus dengan konsep Negara Tuhan. Negara sekuler dianggap sebagai penyelewengan oleh para penguasa yang arif dan bijaksana sehingga kekuasaan bagaikan keangkuhan dengan berbagai kejahatan. Negara Tuhan menghargai segala sesuatu yang baik dan mengutamakan nilai kebenaran. Kemudian muncul pemikiran Thomas Aquinas yang mengungkapkan tentang pembagian negara baik dan negara buruk yang menerapkan sumber teori politik. Menurut Thomas Aquinas (Suhelmi, 2001: 90), Tujuan negara yang diidentik dengan tujuan manusia

dalam hidup yakni mencapai kemuliaan abadi dalam hidup. Untuk mencapai kemuliaan abadi maka diperlukan pemerintah yang berbentuk Monarkhi. Negara memerlukan adanya hukum abadi yang berakar dari jiwa Tuhan yang mengatur alam semesta dan hukum alam manusia untuk merasionalkan manusia mentaati hukum. Hukum Positif yang merupakan pelaksanaan hukum alam dan untuk menyempurnakan pikiran manusia maka diperlukan Hukum Tuhan.

Abad Pertengahan juga merupakan perkembangan yang pesat dari dunia islam. dalam konsep politik islam, Ibnu Khaldun (Satori, 2016: 122) berpendapat Teori tentang negara yang dikategorikan atas pengertian pemerintah manusia dan keterbatasan manusia dalam negara yang disebut negara modern. Setiap warga negara perlu memiliki Askabiyah untuk menumbuhkan kesatuan dalam negara. Untuk itu dikembangkan Teori Politik Askabiyah dan rasa keagamaan oleh pemimpin negara. Perkembangan negara harus didasarkan pada solidaritas dengan keyakinan agama untuk dapat menstabilkan negara. Hal ini perlu didukung oleh penguasa yang memiliki perangkat dominasi pemerintah dan kekuasaan untuk mengatasi manusia-manusia yang memiliki sifat-sifat kebinatangan. Tokoh lain yang adalah Al-Mawardi yang di kemudian hari terkenal dengan karena pemikiran politik melalui bukunya yang berjudul Al-Ahkam as-Sulthaniyyah yang dianggap sebagai buku pertama yang disusun khusus tentang pemikiran politik Islam. Karya ini antara lain telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan Perancis. Selain dari Al-

Ahkam as-Sulthaniyyah, terdapat beberapa karyanya tentang politik Islam, antara lain: Qawanin al-Wizarah (ketentuan-ketentuan kewaziran atau kementerian), Siyasa al-Mulk (strategi kepemimpinan raja), Adab ad-Dunya wa ad-Din (kata krama kehidupan politik duniawi dan agamawi).

Pada akhir periode abad pertengahan muncul pemikiran politik Machiavelli. Machiavelli adalah sebagai ahli teori dan figur utama dalam realitas teori politik, ia sangat disegani di Eropa pada masa renaissance. Dua buku yang terkenal adalah Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio (Diskursus tentang Livio) dan Il Principe (Sang Pangeran). Secara umum pemikiran politik Machiavelli adalah mengenai kekuasaan. Berdasarkan bukunya berjudul Sang Penguasa (1991), Machiavelli menyatakan bahwa raja atau pimpinan negara boleh berbuat apa saja asalkan tujuan bisa tercapai maka negara perlu dapat menindas kepentingan individu.

- **Pemikiran Politik Modern**

Thomas Hobbes, salah satu pemikir politik era kontrak sosial (1992, 32) menyatakan, pada dasarnya manusia itu mementingkan dirinya sendiri dan bersifat rasional. Oleh karena itu, secara alamiah manusia cenderung berkonflik dengan sesamanya. Sifat mementingkan diri sendiri tampak dalam persaingan memperebutkan kekayaan, ketidakberanian demi keselamatan, kemuliaan demi reputasi.

Hobbes menegaskan pula bahwa hasrat manusia itu tidaklah terbatas. Untuk memenuhi hasrat atau nafsu yang tidak terbatas itu, manusia

mempunyai kekuasaan. Oleh karena setiap manusia berusaha untuk memenuhi hasrat dan keinginannya dengan menggunakan kekuasaannya, maka yang terjadi adalah benturan kekuasaan antarsesama manusia. Kondisi alamiah terdapat perjuangan untuk kekuasaan dari manusia atas manusia yang lain. Dalam kondisi alamiah seperti itu manusia menjadi tidak aman dan ancaman konflik yang terus berlangsung. Untuk menghindari konflik yang terus berlangsung maka dibentuklah pemerintahan yang absolut dalam masyarakat yang berada dalam pemerintah yang berdaulat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut pandangan Hobbes kebebasan individu hanya dapat dipelihara oleh suatu pemerintahan yang memiliki kewenangan mutlak.

Pada hakikatnya teori-teori kontrak sosial yang ada di masa pencerahan ini merupakan usaha untuk mendobrak dasar dari pemerintahan absolut dan menetapkan hak-hak politik rakyat. Tokoh yang mencetuskan gagasan ini adalah John Locke dan Montesquieu. Menurut John Locke hak-hak politik meliputi hak hidup, hak atas kebebasan, dan hak milik. Sedangkan Montesquieu mencoba menyusun suatu sistem yang dapat menjamin hak-hak politik itu, yang kemudian dikenal dengan istilah trias politika yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif. Ide-ide bahwa manusia mempunyai hak-hak politik menimbulkan revolusi Prancis pada akhir abad ke 18 serta revolusi Amerika melawan Inggris (Budiardjo, 2008: 111).

Sedangkan JJ Rousseau berpendapat negara adalah berasal dari kontrak sosial antara individu jadi negara merupakan representasi kepentingan

individu-individu di dalamnya, negara harus berusaha mewujudkan kehendak umum bila kehendak itu diabaikan oleh negara, rakyat dapat mencabut mandatnya terhadap penguasa. Rousseau mendambakan suatu sistem pemerintahan yang bersifat demokrasi langsung di mana rakyat menentukan penguasa atau pemimpin mereka, membuat tata negara dan peraturan secara langsung. Demokrasi langsung hanya dapat dilaksanakan pada wilayah yang tidak terlalu luas (Suhelmi, 2001: 237).

c. Pemikiran Politik Bung Hatta

Jika ada pemimpin Indonesia yang hampir sempurna dalam karakter dan integritas pribadi, maka Mohammad Hatta (Hatta) adalah salah satu yang paling menonjol. Wawasan intelektualnya sangat jauh ke depan, sementara etika politiknya yang baik banyak diakui oleh kawan dan lawan politik Bung Hatta.

Dalam buku otobiografi Bung Hatta berjudul Untuk Negeriku jilid pertama (2011) menjelaskan, Bung Hatta keturunan dari keluarga ulama Minangkabau, Sumatera Barat. Pada masa kecilnya hingga menjelang remaja, Bung Hatta mengenyam pendidikan formal Hindia Belanda di Bukittinggi dan Padang sekaligus mendapatkan pendidikan agama yang kuat dari keluarganya membuat Bung Hatta memiliki bekal untuk memperoleh pendidikan hingga ke negeri Belanda tanpa kehilangan identitas budaya dan agamanya. Awal perkenalan Bung Hatta dengan dunia pergerakan nasional ketika Bung Hatta berkenalan dengan tokoh-tokoh Sarikat Usaha dan Jong Sumateranen Bond.

Setelah melanjutkan sekolah ke Batavia lalu dilanjutkan ke Belanda, jiwa pergerakan dan anti kolonial Bung Hatta semakin kuat melalui tulisan-tulisannya yang dimuat surat kabar di Indonesia maupun Belanda. Kemudian pergerakannya di Perhimpunan Indonesia dan Pendidikan Nasional Indonesia jelas menunjukkan sikap Hatta yang anti terhadap Kolonial Belanda. Pengalaman Hatta studi di Eropa khususnya di Belanda, serta buku-buku bacaannya, membawa pemikiran Hatta sangat maju dengan mendapatkan banyak inspirasi dari para intelektual dunia, termasuk pemikiran para filsuf dari Barat dan Timur. Bahkan keluasan pengetahuan Hatta juga meliputi bidang politik, ekonomi, hingga filsafat, seperti terlihat dalam karyanya yang berjudul *Alam Pikiran Yunani* (1963) dan *Pengantar Ke Djalan Ilmu dan Pengetahuan* (1953) (Zubaidi, 2011). Pemikiran politik Bung Hatta sangat dipengaruhi oleh para pemikir barat, namun Bung Hatta tidak larut dalam paradigma Barat karena beliau sangat menentang Liberalisme dan Hatta tetap berpijak pada nilai-nilai asli Indonesia dalam merumuskan konsep-konsep Negara Indonesia.

Selama masa pergerakan, Perhimpunan Indonesia pimpinan Hatta merupakan garda terdepan perjuangan melawan kolonialisme di tanah air meskipun perjuangan Perhimpunan Indonesia dilaksanakan di Belanda. Bung Hatta berpendapat (Noer: 37) bahwa cara non-koperasi dengan pihak Belanda merupakan langkah dalam berjuang, yang bisa berubah sesuai perkembangan. Sikap non-koperasi Hatta dengan Belanda diperlihatkan saat beliau berada dalam masa pembuangan di Boven Digul. Dalam buku *Untuk Negeriku: Sebuah Otobiografi* jilid kedua dijelaskan, bahwa Bung Hatta tidak mau

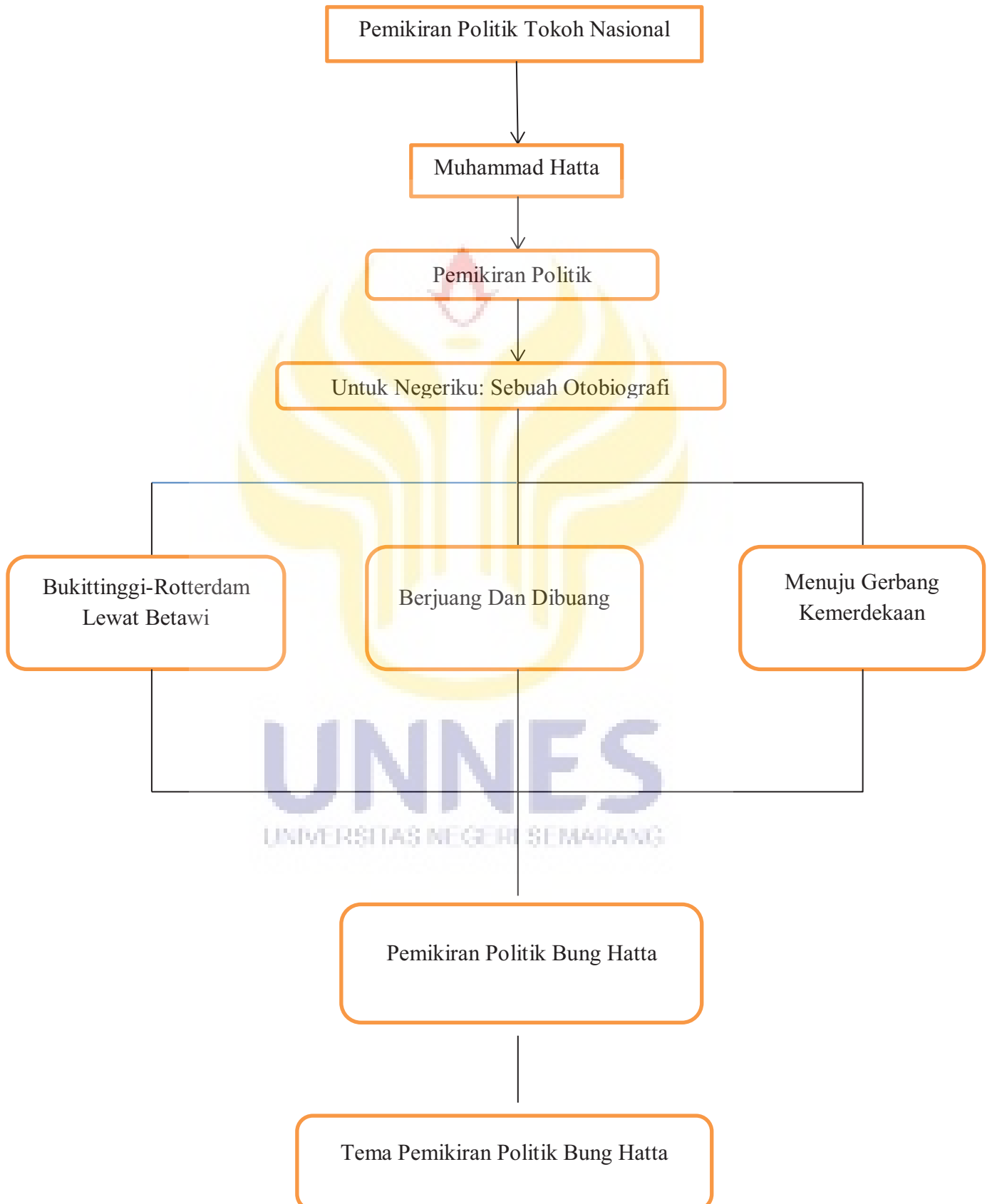
menjadi pegawai Belanda di Boven Digul meskipun dijanjikan mendapat gaji bulanan. Bung Hatta tetap menulis kritiknya terhadap pemerintah Kolonial melalui surat kabar seperti Daulat Rakjat. Sikap kooperatif juga dilakukan Hatta, saat pendudukan Jepang di Indonesia, Bung Hatta dan Bung Karno bersedia bekerjasama dengan Jepang diantaranya melalui organisasi PUTERA.

Bung Hatta sangat berperan penting bagi pembentukan Negara Indonesia. Pemikiran politik Bung Hatta mengenai demokrasi menunjukkan Cita-cita tentang keadilan sosial adalah sari pati dari nilai-nilai timur dan barat yang mengkrystal dan membentuk visi Hatta mengenai masalah-masalah politik kenegaraan. Hatta sangat percaya bahwa demokrasi adalah hari depan sistem politik Indonesia. Kepercayaan yang mendalam kepada prinsip demokrasi inilah yang pernah menempatkan Hatta pada posisi yang berseberangan dengan Bung Karno ketika masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966). Dalam tulisannya yang berjudul Demokrasi Kita (2015), Bung Hatta menilai Demokrasi Terpimpin Bung Karno sebagai sistem otoriter yang menindas demokrasi. Sedangkan pada ekonomi politik, Bung Hatta mencetuskan Demokrasi Ekonomi melalui ekonomi sosialis, yang disebut politik perekonomian. Menurut Hatta (2015), negara diberi hak untuk mengatur sektor-sektor ekonomi yang besar dan strategis tanpa mengabaikan peran swasta. Kemudian dibentuknya koperasi yang dijadikan sektor produksi yang bersifat kolektif.

Dari sekian banyak pemikiran politik Bung Hatta. Penelitian ini mengkaji pemikiran politik Bung Hatta yang terdapat dalam buku tiga jilid berjudul Untuk Negeriku: Sebuah Otobiografi. Kajian historis-filosofis ini dimaksudkan

untuk mengungkap secara bermakna pemikiran Hatta yang dituangkan dalam buku Untuk Negeriku: Sebuah Otobiografi. Adapun wilayah kajian dari pembahasan ini adalah mengungkap pemikiran politik berdasarkan latar belakang pribadi Hatta sampai kiprahnya dalam panggung kekuasaan hingga pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada 27 Desember 1949 melalui konsep-konsep politik seperti yang telah disampaikan pada sub bab sebelumnya.



B. Kerangka Berpikir

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tema Pemikiran politik Bung Hatta pada masa sekolah adalah perkembangan pemikiran Bung Hatta khususnya mengenai nasionalisme, ekonomi politik dan sosialisme. Hatta mulai membuka pemikirannya tentang nasionalisme melalui pandangannya tentang nilai-nilai kemanusiaan yang akhirnya berkembang menjadi sikap anti kolonialisme dan muncul rasa nasionalisme. Awalnya masih sebatas nasionalisme sebagai orang Sumatera, lalu berkembang menjadi nasionalisme secara luas meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda. Dengan demikian, tema pemikiran politik Bung Hatta pada masa sekolah berfokus pada perkembangan nasionalisme dari Bung Hatta. Dalam ekonomi politik, masa sekolah merupakan masa perkembangan pemikiran Hatta mengenai ekonomi. Pemikiran Hatta mengenai ekonomi dipengaruhi oleh latar belakang keluarganya yang merupakan saudagar. Ciri utama pemikiran ekonomi Bung Hatta pada masa sekolah adalah ia mulai mendalami ekonomi politik setelah membaca Bellamy dan NG Pierson tentang ekonomi. Pemikiran Hatta mengenai sosialisme adalah pengenalan Hatta dengan sosialisme melalui buku karya Quack berjudul *De Socialisten* yang kemudian membuat Hatta mempelajari sosialisme dengan lebih

mendalam. Dengan demikian tema utama pemikiran politik Bung Hatta pada masa sekolah dalam kurun waktu 1908-1921 adalah mulai muncul dan berkembangnya pemikiran Hatta mengenai nasionalisme yang kemudian diikuti dengan perkembangan pemikiran mengenai ekonomi politik dan sosialisme.

2. Tema pemikiran politik Bung Hatta pada masa Pergerakan Nasional adalah mengenai nasionalisme, ekonomi politik, demokrasi, dan kepemimpinan. Pemikirannya mengenai nasionalisme, Hatta mengimplementasikan gagasan nasionalisme yang telah timbul sejak masa sekolah melalui politik pergerakan dan kepemimpinannya dalam organisasi pergerakan di Perhimpunan Indonesia dan Pendidikan Nasional Indonesia. Dalam ekonomi politik, pada masa pergerakan nasional Hatta menemukan gagasan ekonomi kerakyatan melalui koperasi. Pemikiran Hatta mengenai demokrasi pada masa pergerakan nasional adalah memunculkan gagasan kedaulatan rakyat. Pemikiran Hatta mengenai kepemimpinan memiliki ciri penekanan pada kaderisasi terhadap anggota organisasinya sehingga perjuangan akan terus berjalan tanpa tergantung pada seorang pimpinan. Tema utama pemikiran Bung Hatta pada masa pergerakan nasional dalam kurun waktu 1921-1942 adalah implementasi gagasan nasionalisme Bung Hatta yang telah timbul sejak masa sekolah melalui politik pergerakan dan kepemimpinannya dalam organisasi pergerakan. Melalui sepak terjangnya dalam pergerakan nasional, Hatta melahirkan konsep demokrasi ekonomi yang kemudian berkembang lebih luas menjadi gagasan kedaulatan rakyat.

3. Tema Pemikiran Politik Bung Hatta pada masa revolusi fisik meliputi kepemimpinan, demokrasi, dan ekonomi politik. Dalam pemikirannya mengenai kepemimpinan, Pada masa revolusi fisik Hatta telah menjabat sebagai Wakil Presiden dan Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan. Hatta menjalankan wewenangnya sebagai Wakil Presiden dan Perdana Menteri dengan melakukan kebijakan yang dapat memuluskan cita-cita Republik Indonesia untuk mendapat pengakuan kedaulatan dari Belanda dan negara lain di dunia pada umumnya. Mengenai demokrasi, melalui kewenangannya sebagai wakil presiden dan Perdana Menteri, Hatta mengeluarkan aturan-aturan yang melandasi berdirinya Republik Indonesia sebagai negara demokrasi yaitu Maklumat Wakil Presiden Nomor X 1945 dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 3 November 1945. Ciri utama pemikiran Bung Hatta mengenai ekonomi politik pada masa ini adalah peranan Hatta dalam membuat landasan ekonomi Republik Indonesia dengan ekonomi kerakyatan berdasarkan asas koperasi yang tercantum dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, tema pemikiran politik Bung Hatta pada masa revolusi fisik adalah pemikirannya mengenai demokrasi dan ekonomi politik dimana Hatta menjalankan pemikirannya tentang demokrasi dan ekonomi politik melalui kewenangannya sebagai Wakil Presiden dan Perdana Menteri. Dengan demikian tema utama pemikiran politik Bung Hatta pada masa revolusi fisik dalam kurun waktu 1945-1949 adalah pemikirannya mengenai demokrasi dan ekonomi politik dimana Hatta menjalankan pemikirannya tentang

demokrasi dan ekonomi politik melalui kewenangannya sebagai Wakil Presiden dan Perdana Menteri.

4. Tema Utama pemikiran politik Bung Hatta yang tertulis dalam buku berjudul Untuk Negeriku: Sebuah Otobiografi adalah mengenai nasionalisme dan demokrasi. Nasionalisme adalah pemikiran pertama yang muncul dalam diri Bung Hatta yang didasari persamaan sebagai sesama manusia, melalui nasionalisme inilah kemudian melahirkan wacana persatuan nasional dan akhirnya muncul pemikiran tentang demokrasi dengan cita-cita kedaulatan rakyat. Cita-cita demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat ini kemudian melahirkan konsepsi Ekonomi Kerakyatan melalui koperasi serta kepemimpinan yang berasaskan kaderisasi dan pendidikan kepada rakyat Indonesia.

B. Saran

1. Kepada para pemimpin bangsa saat ini, supaya melestarikan cita-cita Bung Hatta untuk menciptakan negara Indonesia yang demokratis serta menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Para pemimpin bangsa saat ini juga perlu meneladani keikhlasan dan ketulusan Bung Hatta dalam berjuang membangun Indonesia tanpa menghiraukan resiko yang akan diterima sebagai akibat daripada perjuangan itu.
2. Kepada para akademisi, penelitian ini merupakan langkah awal dalam mengkaji pemikiran politik Bung Hatta. Sehingga diharapkan para

akademisi dapat memperdalam kajian-kajian mengenai pemikiran politik Bung Hatta pada masa yang akan datang.

3. Kepada masyarakat, perlu adanya peningkatan dalam mengenal para tokoh pendiri bangsa agar kita tidak kehilangan identitas sebagai bangsa Indonesia.



Daftar Pustaka

Buku

- Abdul Hadi, W.M. 2008. *Hermeneutika Sastra Barat dan Timur*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Amal, Ichsanul. 1988. *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Al-Zastrow. 1999. *Gus Dur Siapa Sih Sampeyan*. Jakarta: Erlangga.
- Badara, Aris. 2012. *Analisis Wacana: Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Bungin, Burhan. 2015. *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Busroh, Abu Daud. 2001. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Caparaso, James A dan Levine, David. 1992. *Teori-Teori Ekonomi Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cook, Guy. 1989. *Discourse*. Oxford: Oxford University Press.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Eriyanto. 2005. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: Lkis.Tical Linguistics. Dalam Cald.
- Handoyo, Eko. 2010. *Etika Politik dan Pembangunan*. Semarang: Widya Karya.
- Hatta, Mohammad. 2011. *Untuk Negeriku Sebuah Otobiografi Jilid satu, Bukittinggi-Rotterdam Lewat Betawi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

- Hatta, Mohammad. 2011. *Untuk Negeriku Sebuah Otobiografi Jilid Dua, Berjuang dan Dibuang*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Hatta, Mohammad. 2011. *Untuk Negeriku Sebuah Otobiografi Jilid Tiga, Menuju Gerbang Kemerdekaan*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Hatta, Mohammad. 2015. *Karya Lengkap Bung Hatta Buku 4, Keadilan dan Kemakmuran*. Jakarta: LP3ES.
- Hatta, Mohammad. 2015. *Mohammad Hatta Politik, Kebangsaan, Ekonomi (1926-1977)*. Jakarta: Kompas.
- Ingelson, John. 1993. *Perhimpunan Indonesia dan Pergerakan Kebangsaan*. Jakarta: Grafiti.
- Kartodihardjo, Sartono. 1990. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional, dari Kolonialisme sampai Nasionalisme Jilid dua*. Jakarta: Gramedia.
- Kaelan. 2002. *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kartono, Kartini. 2009. *Pendidikan Politik*. Bandung: Mandar Maju.
- Kolip, Usman dan Setiadi, Elly M. 2013. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Prenadamedia.
- Kukathas, Chandran dan Gaus, F Gerald. 2012. *Handbook Teori Politik*. Jakarta: Nusa Media.
- Kencana, Inu. 2010. *Ilmu Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Laswell, Harold D. 1972 *Politics: Who, Get, What, When, How*. New York: Meridian Books Inc.
- Lubis, Ahmad Hasan. 1993. *Analisis Wacana Pragmatik*. Bandung: Angkasa.

- MK, Romadhon, M. 2015. *Soekarno Hatta Syahrir Kisah dan Memoar Tiga Macan Asia di Tengah Hiruk Pikuk Perjuangan*. Yogyakarta: Araska
- Mulyana. 2005. *Kajian Wacana Teori, Metode, dan Aplikasi Prinsip-Prinsip Analisis Wacana*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Nababan, PWJ. 1987. *Ilmu Pragmatik (Teori dan Penerapannya)*. Jakarta: Proyek Pengembangan Lembaga Tenaga Kependidikan.
- Nasiwan, M.Si. 2007. *Teori-Teori Politik*. Yogyakarta: Ombak.
- Noer, Deliar. 2012. *Mohammad Hatta, Hati Nurani Bangsa*. Jakarta: Kompas.
- Osborne, Richard. 2001. *Filsafat Untuk Pemula*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Rahardjo, Mudjia. 2012. *Dasar-Dasar Hermeneutika: Antara Internasionalisme dan Gadamerian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Rahman, Arifin. 2002. *Sistem politik Indonesia dalam Perspektif Fungsi dan Struktur*. Surabaya: SIC
- Rapar. Jan Hendrik. 1996. *Pengantar Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sahid, Komarudin. 2011. *Memahami Sosiologi Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Santosa, Riyadi. 2011. *Logika Wacana: Hubungan Konjungtif dengan Pendekatan Linguistik Sistemik Fungsional*. Surakarta: UNS Press.
- Satori, Ahmad dan Kurdi, Sulaiman. 2016. *Sketsa Pemikiran Politik Islam*. Jogjakarta: Deepublish.
- Sobur, Alex. 2004. *Analisis Analisis Teks Media: Suatu pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Soegito, dkk. 2007. *Pendidikan Pancasila*. Semarang: Pusat Pengembangan MKDK Unnes.

- Soehino. 1998. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Sorensen, Georg. 1993. *Demokrasi dan Demokratisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suhelmi, Ahmad. 2007. *Pemikiran Politik Barat. Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat, dan Kekuasaan*. Jakarta: Gramedia.
- Suleman, Zulkifli. 2010. *Demokrasi Untuk Indonesia, Pemikiran Politik Bung Hatta*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Sumaryono, E. 1999. *Hermeuneutik: Sebuah Metode Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Suyahmo. 2014. *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Suyahmo. 2014. *Logika*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Titscher, Stefan, Mayer, Michael, Wodak, Ruth, dan Vetter, Eva. 2000. *Metode Analisis teks dan Wacana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jurnal, Skripsi, Tesis

- Aman. 2015. Pemikiran Hatta Tentang Demokrasi, Kebangsaan Dan Hak Azasi Manusia. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Hidayatullah, Yusuf. 2014. Nasionalisme dalam Novel (Analisis Wacana tentang Nasionalisme dalam Novel Bumi dan Manusia Karya Pramoedya Ananta Toer). *Skripsi*. Solo: Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Putra, Okrisal Eka. 2008. Politik dan Kekuasaan dalam Islam (Pengantar Studi Politik dalam Aspek Manajemen Dakwah). Vol.1 No.1.
- Santoso, Anang. 2008. Jejak Halliday dalam Linguistik Kritis. Vol.1 No.1.
dan Analisis Wacana Kritis. No. 1. Hal 2.

- Simbolon, Marudut. 2008. Partai Politik dan Sistem Politik (Suatu Studi Transformasi Pemikiran dan Teori Analisis Sistem Politik Gabriel A Almond dalam Perspektif Politik Pemerintahan SBY-JK). *Skripsi*. Medan:Universitas Sumatera Utara.
- Suwardi, Eddy. 2007. Jong Sumatranen Bond: Dari Nasionalisme Etnik Menuju Nasionalisme Indonesia. *Tesis*. Depok: Universitas Indonesia.
- Zain, Muhammad Adib. 2015. Politik Hukum Koperasi di Indonesia (Tinjauan Yuridis Historis Pengaturan Perkoperasian di Indonesia). Vol 2. No. 3.
- Zubaidi, Ahmad. 2011. Landasan Aksiologis Pemikiran Bung Hatta tentang Demokrasi. Vol. 21. No. 2.

